

ASN Harus Memadukan Infrastruktur dan Kultur

BOGOR (IM)- Wali Kota Bogor, Bima Arya menekankan bahwa tugas jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yakni memadukan antara pembangunan infrastruktur dan kultur. Bima berpendapat, kultur bisa diubah ketika infrastrukturnya dibangun.

“Tempat yang sudah ditata tidak akan memberikan berkah jika tidak dijaga atau tidak dirawat bersama-sama. Bahkan, kemungkinan akan muncul vandalisme dan kembali menjadi kumuh jika tidak dijaga dan dirawat,” ungkap Bima kepada wartawan pada Senin (28/2).

Bima melanjutkan, dirinya optimistis dengan konsistensi membangun sistem, mendidik warga, melakukan edukasi kultur, maka titik-titik yang ada di Kota Bogor umumnya akan menjadi titik kebanggaan. Salah satu contoh adalah pedestrian seputar Istana Bogor atau Sistem Satu Arah (SSA).

“Hingga saat ini tidak ada satupun PKL yang berjualan di SSA karena kultur yang ada sudah terbangun, warga mengawasi dan semua sadar sehingga kawasan SSA menjadi kebang-

gaan Kota Bogor,” terangnya. Bima melanjutkan, dirinya menginginkan hal tersebut ada di seluruh sudut Kota Bogor, bukan hanya di seputaran SSA tetapi di seluruh sudut Kota Bogor. Seperti kawasan sekitar Suryakencana yang berikutnya akan ditata.

“Insya Allah kedepan kawasan Empang juga akan kami tata, bergerak ke arah stasiun dan nanti semua akan dilanjutkan oleh wali kota selanjutnya. Paling tidak ini menjadi contoh, jika kita mau Insya Allah kita bisa,” tutur Bima.

Bima menegaskan, kepada para aparatur wilayah, tidak boleh ada pembaruan-pembaruan ruang milik publik ‘dibajak’. Alhamdulillah berkat kerja keras semua, dianggarkan, direncanakan dan dikawal oleh teman-teman di wilayah.

“Contohnya gang-gang yang ada antara Jalan Roda dan Suryakencana bisa dirapikan untuk mengembalikan hak-hak milik publik, semua berhak untuk lewat di sini. Selain itu juga akan kami bangun menjadi destinasi wisata andalan yang terintegrasi dengan kawasan Suryakencana,” jelasnya. ● **gio**

Bupati Bogor: Atasi Kemacetan Puncak, Perlu Kolaborasi dengan Pemprov Jabar

CIBINONG (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin berharap Pemprov Jabar bisa bersama-sama pihaknya menata kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Ia mengakui, kawasan Puncak memang memiliki potensi yang cukup besar tetapi dihadapkan dengan permasalahan kemacetan yang hingga kini belum terselesaikan.

Untuk itu, kata Ade, perlu kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menangani kemacetan wilayah Puncak salah satunya dengan jalur Puncak dua. Jalur ini, jelasnya, harus dibangun agar bisa mengatasi masalah kemacetan di kawasan Puncak, karena jalur Puncak dua ini akan terhubung, mulai Sentul Kabupaten Bogor hingga Istana Cipanas Kabupaten Cianjur.

“Kadang kita kalau ada tamu dari luar negeri dibawa kesini tuh malu karena macet. Pernah saya bawa orang Korea, ketika macet stuck begitu, akhirnya balik lagi. Ini mesti ada solusinya, salah satu solusinya yaitu jalur Puncak dua,” kata Ade Yasin, Senin (28/2).

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengungkapkan, dengan penduduk yang cukup besar dengan luas wilayah yang juga besar ada 8 pintu yang harus dilakukan dalam membangun Kabupaten Bogor termasuk menangani masalah kawasan Puncak.

Perlu kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Para Camat hingga pihak swasta. “Jadi tidak hanya bisa dilakukan dengan APBD Kabupaten, Provinsi dan pusat. Bisa dengan mengorganisasikan CSR, kan di wilayah itu banyak perusahaan-perusahaan. Jadi kita harus lebih gesit, lebih cerdas, banyak sumber-sumber, tidak harus pakai dana negara,” bebarnya.

Menurut Ridwan Kamil, pada dasarnya ia selalu mendukung pembangunan Kabupaten Bogor, dan siap membantu mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor, bahkan dalam moment tertentu untuk memperjuangkan aspirasi Kabupaten Bogor. ● **gio**

8 | Nusantara



FESTIVAL HADRAH

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (tengah) bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (kanan) memukul bedug saat pembukaan Festival Hadrah 2022 di kawasan Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (28/2). Kegiatan tersebut digelar untuk memperingati perjalanan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW sekaligus membangkitkan kembali seni budaya Islam di Indonesia.

LONG WEEKEND PUNCAK MACET 20 JAM

Ketua DPRD Kab. Bogor Minta PUPR Maksimalkan Jalur Alternatif

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto memohon jajaran Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar duduk bersama mencari solusi yang paling baik untuk semua kepentingan.

“Di Puncak terdapat sejumlah jalur alternatif, tinggal bagaimana memaksimalkannya agar dapat digunakan sebagai solusi mengatasi penumpukan kendaraan. Langkah lainnya seperti membangun fly over, membangun underpass atau lainnya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak,” kata Rudy.

Terpisah, Camat Cisarua, Ivan Pramudia, mengatakan hasil tinjauan lapangan jajarannya, ada aset jalan dan lahan milik Pemprov Jawa Barat yang terbengkalai di jalur Puncak.

Aset-aset milik Pemprov Jabar yaitu di jalan yang menghubungkan Naringgul, Desa Tugu Utara dengan Desa Batu Layang, Cisarua. “Hasil tinjauan kami, ada jalan yang menghubungkan Naringgul, Desa Tugu Utara dengan Desa Batu Layang, Cisarua berstatus milik Pemprov Jawa Barat

(PUPR) agar duduk bersama mencari solusi yang paling baik untuk semua kepentingan.

“Kemacetan Puncak sudah terjadi bertahun-tahun. Setiap kali libur panjang banyak pengguna jalan yang tersiksa lantaran terjebak kemacetan panjang. Harus ditempuh solusi terbaik dari semua pihak. Salah satu solusinya dengan memaksimalkan jumlah jalur alternatif yang berada di kawasan Puncak,” kata Rudy, Senin (28/2).

Rudy lantas memohon jajaran Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

yang terbengkalai, kami mohon jalan dan lahan tersebut dihibahkan ke Pemkab Bogor dan pemerintah desa setempat, hingga bisa kami bangun untuk menjadi bagian jalur alternatif utara dan bisa membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak,” kata Ivan.

Ivan menambahkan, panjang jalan tersebut sepanjang 3 Km dengan lebar 2,5 meter. Jalan tersebut, tambah Ivan bisa ditingkatkan melalui anggaran satu milyar satu desa (Sami Sade).

“Jika nanti sudah dihibahkan atau diserahkan ke Pemkab Bogor atau pemerintah desa setempat, maka jalan yang terbengkalai atau kurang terurus tersebut maka akan dibangun oleh pemerintah desa melalui program Sami Sade,” tambahnya.

Seperti diketahui, meningkatnya volume kendaraan di musim libur Isra Miraj membuat jalur Puncak macet hingga puluhan jam. Volume kendaraan yang meroket tidak hanya roda empat, ratusan ribu roda dua

juga terjebak kemacetan yang bermuara dari penyempitan jalur. Tak hanya di jalur utama Jalan Raya Puncak-Bogor, antrean panjang kendaraan juga mengular hingga exit tol Ciawi dan Jalan Raya Tajur, Kota Bogor.

Petugas gabungan yang bisa berjaga di Pos Gadag juga tampak kewalahan menghadapi gelombang besar kendaraan yang didominasi nopol B (Jakarta dan sekitarnya). Kemacetan panjang tersebut terpantau sejak Minggu (27/2) sore hingga Minggu (28/2) pagi. Sejumlah pengendara roda dua dan roda empat, bahkan terlihat pasrah dan memadamkan mesin kendaraannya setelah tiga jam tak bisa bergerak.

Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin bahkan hingga turun ke jalan ikut mengatur lalu lintas. Ia juga mengerahkan personel polisi wanita untuk menyapa pengguna jalan yang terjebak kemacetan. Tak hanya itu, Polres Bogor juga membagikan air mineral dan snack kepada pengguna jalan. ● **gio**

Alih Fungsi Jabatan Struktural ke Fungsional Pemkab Cirebon, Menuai Kritik

CKIREBON (IM)- Ketua Korpri Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar menilai pelaksanaan penyetaraan jabatan yang dilakukan Pemkab Cirebon tidak melalui kajian dan penempatan pejabat yang serumpun. Sehingga, hasilnya tidak efektif bahkan amburadul.

Menurut Iis, kebijakan pemerintah pusat yang mengalihfungsikan jabatan struktural ke jabatan fungsional, tujuan utamanya adalah untuk efektifitas dan efisiensi. Hal ini supaya ASN bisa bekerja secara profesional. Kebijakan tersebut memang sudah bagus, karena bisa menyederhanakan birokrasi.

“Penyetaraan struktural ke fungsional, adalah kebijakan pemerintah pusat. Tapi orang yang menjabat struktural itu kewenangannya Bupati. Bagus tidaknya itu tergantung orangnya yang menduduki jabatan tersebut,” ungkap Iis, Senin (28/2).

Namun Iis menilai, untuk Pemkab Cirebon sendiri, tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Justru dia menyebutkan, penyederhanaan birokrasi yang dilakukan Pemkab Cirebon itu, sebagai “kecelakaan”. “Ya bisa dikatakan kecelakaan, karena penempatan awal orang di jabatan struktural ini tidak dilihat dari rumpon jabatannya,” jelasnya.

Iis mencontohkan, pada

penyederhanaan birokrasi kemarin, ada Kasubag keuangan yang berlatarbelakang sarjana teknik. Namun kenapa menjadi menjadi analis keuangan. Selain itu, ada juga sarjana teknik di PUTR yang dipindahkan ke fungsional. Sementara jabatan strukturalnya, dipegang oleh pejabat yang berlatarbelakang sarjana ekonomi.

“Bukan karena kekurangan tenaga profesional, ini lebih kepada tepat tidaknya penempatan. Ahli teknik ada, tapi kenapa ditempatkan di keuangan. Ahli SDM juga ada, kenapa ditempatkan di tempat yang lain,” akunya.

Harusnya, lanjut Iis, penerapan kebijakan pemerintah pusat tersebut bukan hanya sebatas tekstual saja. Namun bagaimana Pemkab Cirebon membenahi dulu pejabat struktural dengan pejabat yang serumpun. Artinya, jabatan struktural yang akan beralih menjadi fungsional, harus ditempatkan oleh pejabat-pejabat yang sesuai rumpon jabatannya.

“Saya meragukan kapasitas Baperjakat karena mereka tidak berlatarbelakang ilmu dan pengalaman yang sesuai. Saya kasihan bupati terus dibohongi bawahannya. Harusnya Baperjakat sering melakukan konsultasi dan bertanya kepada ahlinya,” terang Iis. Iis menyebut, saat ini ratusan

pejabat yang beralih ke fungsional masih belum merasakan akibatnya. Tapi lambat laun, mereka akan merasakan dampak dari kesalahan penyederhanaan birokrasi ini. Pasalnya, ketika mereka menempati jabatan fungsional, maka akan selamanya pada jabatan tersebut. Hal itu berbeda dengan jabatan struktural yang bisa dengan mudah dipindah-pindahkan.

“Kalaupun diberi kesempatan untuk pindah, harus melalui ujikom dan penyesuaian lagi. Tapi lambat laun, mereka akan terdampak, bahwa tidak akan gampang pindah ke jabatan lain. Analisis keuangan yang sarjana teknik, akan susah untuk kembali ke teknik,” paparnya.

Iis menambahkan, penyederhanaan yang sudah dilakukan Pemkab Cirebon tersebut sebenarnya bisa direvisi. Tapi hal itu tidak mungkin dilakukan karena pastinya ada gengsi yang menghalangi. Selain revisi, juga dimungkinkan untuk digugat kalau para pejabat yang sudah beralih tugas mau melukukannya.

“Saat ini indeks profesional di Kabupaten Cirebon yang semula nilainya 71, turun drastis dan berada di angka 40. Ini kalau tidak diperbaiki, Kabupaten Cirebon pasti semakin mundur,” tukasnya. ● **pur**



KEPADATAN ARUS LALU LINTAS DI JALUR PUNCAK BOGOR

Kepadatan kendaraan di jalur wisata Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (28/2). Tingginya volume kendaraan wisatawan saat libur Isra Miraj Nabi Muhammad SAW menyebabkan terjadinya kepadatan di jalur wisata Puncak Bogor sehingga Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah serta pengalihan arus lalu lintas untuk mengurangi kepadatan kendaraan.

Butuh Rp400 Miliar untuk Jalan Khusus Tambang

BANDUNG (IM)- Pembangunan Jalan Khusus Tambang di Kabupaten Bogor membutuhkan biaya Rp400 Miliar. Begitu skema pembiayaannya.

Pembangunan Jalan Khusus Tambang takkan menyedot duit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, pembangunan Jalan Khusus Tambang bakal memakai biaya dari badan usaha milik daerah (BUMD), konsorsium pengusaha tambang ataupun investor lainnya.

“Rencana pembangunan jalan khusus tambang ada kemajuan di mana pembiayaannya tidak menggunakan APBD tingkat I tetapi menggunakan uang kas BUMD Jawa Barat PT. Jasa Sarana dan dana investasi konsorsium pengusaha tambang, konsorsium usaha

truk tambang ataupun investor lainnya,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada wartawan, Sabtu (26/2).

Ridwan Kamil meyakini, biaya pembangunan jalan khusus tambang yang dikeluarkan oleh PT. Jasa Sarana maupun investor akan balik modal.

Menurutnya, truk tambang yang akan melewati jalan khusus tambang tersebut akan membayar layaknya jalan tol. “Insya Allah, semua biaya investasi yang dikeluarkan untuk membangun jalan khusus tambang tersebut akan balik modal dan saya minta jalan khusus tersebut akan terkoneksi dengan jalan lainnya (baik tol maupun arteri yang ada di wilayah lain di luar Kabupaten Bogor),” tambah Ridwan Kamil. ● **pur**

PHRI Kota Bogor: Okupansi Hotel Tertahan 50 Persen

BOGOR (IM)- Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Jawa Barat, menyebutkan, tingkat hunian atau okupansi hotel di daerahnya tertahan 50 persen akibat aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang membatasi kapasitas kunjungan tersebut. Kondisi tersebut sudah berjalan selama dua bulan PPKM level 3 kembali ditetapkan di kota hujian itu.

“Jadi semenjak PPKM level 3, sesuai aturan kunjungan kita antara 50 sampai 55 persen,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay dikonfirmasi di Kota Bogor, Senin (28/2).

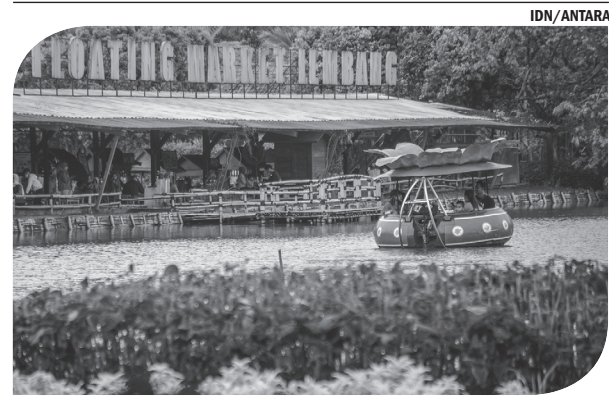
Padahal pada situasi normal Februari hingga Maret, okupansi hotel di Kota Bogor bisa mencapai 80 persen hampir merata di 110 anggota PHRI di Kota Bogor terdiri atas 59 hotel dan 26 restoran. Diketahui, Aturan PPKM level 3 dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 12/2022, operasional restoran dan kafe hanya diizinkan sampai pukul 21.00, dengan kapasitas maksimal 50 persen dan maksimal satu meja dua orang.

Waktu makan pun hanya berlaku sampai 60 menit. Sementara untuk kafe dan restoran yang beroperasi malam hari hanya

dibatasi pukul 18.00-00.00 WIB dengan kapasitas pengunjung hanya 25 persen dan maksimal meja hanya dua orang, serta waktu makan maksimal 60 menit.

Fasilitas ruang pertemuan atau ruang rapat dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar (ballroom) diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 25 persen. Serta, penyediaan makanan dan minuman pada ruang pertemuan maupun dinas otomatis berkurang karena pegawai banyak yang kembali kerja di rumah.

“Kondisinya begitu. Tapi tetap berjalan, Alhamdulillah. Untuk menaikkan lagi kunjungan, kami banyak memberikan promosi-promosi,” kata Yuno. ● **gio**



PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI LEMBANG Wisatawan menaiki perahu di Kawasan Wisata Floating Market, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (28/2). Pengelola wisata Floating Market menyatakan, pada libur panjang Isra Miraj 2022 terjadi peningkatan pengunjung sebanyak 50 persen atau 3.000 pengunjung perhari dibandingkan dengan akhir pekan lalu yang hanya 2.000 pengunjung perhari.

TUNJUKKAN SOLIDARITAS UNTUK ANAK PENGIDAP KANKER

Ganjar Ikuti Aksi Berani Gundul

SEMARANG (IM)- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merelakan rambutnya terpengkas habis saat mengikuti aksi “Berani Gundul” yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Gubernur yang terkenal dengan rambut putih khasnya itupun kini berkepala plontos. “Ini gara-gara ngikutin Mas Andy nih,” kata Ganjar berseloroh sambil menyapa Andy F Noya, jurnalis senior yang juga seorang aktivis sosial.

Ganjar mengaku berani gundul untuk menunjukkan empati, dukungan, serta solidaritas kepada anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker. Prosesi penggundulan rambutnya dilakukan di rumah dinas Puri Gedeh usai memberikan sambutan dalam aksi “Berani Gundul” yang dilaksanakan secara virtual dan dipusatkan di Mal Paragon, Semarang, Senin (28/2).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah juga menyapa sejumlah anak penderita kanker yang bergabung secara virtual. Mereka bergabung dari Manado, Surabaya, hingga Semarang. “Kalau rambut di-

pengkas habis, bisa tumbuh kembali. Tetapi, membangun empati, solidaritas kepada anak-anak kita yang berjuang melawan kanker, menurut saya, esensi pentingnya,” kata Ganjar.

Aksi Berani Gundul ini juga diikuti oleh sejumlah orang dengan cukur gundul serentak di Mal Paragon Semarang. Salah satu pesertanya adalah seorang ibu rumah tangga. “Berdasarkan laporan panita, rambut dari ibu bernama Ulin itu ‘berharga’ Rp 20 juta dan didonasikan untuk anak-anak penderita kanker,” kata Ganjar.

Sementara itu, Andy F Noya turut mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah yang berpartisipasi dalam aksi Berani Gundul kali ini. Ia pun berharap, aksi “Berani Gundul” yang diikuti Ganjar Pranowo ini juga bisa menginspirasi dan akhirnya juga memantik kepala daerah lain untuk mendukung dan menumbuhkan empati kepada anak-anak pejuang kanker di Tanah Air. “Harapannya donasi yang didapatkan dalam peringatan Hari Kanker Anak Sedunia ini juga bakal semakin banyak,” ujarnya. ● **pra**